

KEBIJAKAN INTEGRATIF DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAHASA ASING: IMPLIKASI TERHADAP KUALITAS DAN RELEVANSI LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Fitriyani¹, Ratih Arifin²

Universitas Bina Taruna Gorontalo

ftryn.ed@gmail.com, araarifin89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan integratif dalam pengembangan kompetensi bahasa asing serta implikasinya terhadap kualitas dan relevansi lulusan perguruan tinggi, dengan studi kasus di Universitas Bina Taruna Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan penguatan kemampuan bahasa asing di tingkat institusi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan fakultas, dosen bahasa asing, dan mahasiswa, disertai observasi lapangan serta studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampus telah berupaya mengintegrasikan pembelajaran bahasa asing ke dalam kurikulum sebagai strategi peningkatan daya saing lulusan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesinambungan kebijakan, dan lemahnya koordinasi antarunit akademik. Meskipun demikian, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi mahasiswa dan perluasan wawasan global. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pihak universitas, pemerintah, dan dunia industri dalam membangun kebijakan bahasa asing yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adaptif terhadap tuntutan globalisasi dan pembangunan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Kebijakan Integratif, Kompetensi Bahasa Asing, Kualitas Lulusan, Relevansi Pendidikan Tinggi, UNBITA Gorontalo

ABSTRACT

This study aims to analyze the integrative policy in developing foreign language competence and its implications for the quality and relevance of university graduates, using a case study at Bina Taruna University (UNBITA) Gorontalo. Employing a descriptive qualitative approach, the research explores in depth the formulation, implementation, and evaluation processes of institutional policies on foreign language enhancement. Data were collected through in-depth interviews with faculty leaders, foreign language lecturers, and senior students, complemented by field observations and document analysis of university policy records. The findings indicate that UNBITA has made efforts to integrate foreign language learning into the curriculum as part of its strategy to strengthen graduate competitiveness. However, the implementation still faces several challenges, including limited human resources, policy discontinuity, and weak coordination between academic units. Despite these constraints, the policy has contributed positively to students' motivation and global awareness. The study highlights the importance of collaboration among universities, government agencies, and industry sectors in developing sustainable and market-relevant language policies. These findings are expected to serve as a reference for designing higher education policies that are more adaptive to globalization and human resource development demands.

Ratih Arifin, Cs: Kebijakan Integratif Dalam Pengembangan Kompetensi Bahasa Asing Page. 39

Keywords: Integrative Policy, Foreign Language Competence, Graduate Quality, Higher Education Relevance, UNBITA Gorontalo

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah paradigma pendidikan tinggi dari sekadar proses transfer ilmu menjadi arena kompetisi internasional dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam era ini, kemampuan berbahasa asing menjadi salah satu kompetensi strategis yang harus dimiliki oleh setiap lulusan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan global yang multikultural. Bahasa asing tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi, kolaborasi akademik, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Menurut Tollefson dan Pérez-Milans (2021), kebijakan bahasa berperan sentral dalam membentuk akses terhadap pengetahuan dan partisipasi global, menjadikan kompetensi berbahasa sebagai elemen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di abad ke-21.

Dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia, urgensi penguasaan bahasa asing semakin meningkat seiring dengan implementasi kebijakan internasionalisasi pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2023) mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu lulusan agar berdaya saing global melalui kebijakan *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Salah satu pilar kebijakan ini adalah membuka ruang kolaborasi internasional yang menuntut kemampuan komunikasi lintas bahasa dan budaya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perguruan tinggi yang belum memiliki kebijakan terintegrasi untuk mengembangkan kompetensi bahasa asing mahasiswa secara sistematis dan berkelanjutan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat institusi. Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia masih memperlakukan pembelajaran bahasa asing sebagai mata kuliah pelengkap, bukan sebagai komponen strategis dalam kurikulum. Hal ini menyebabkan banyak lulusan yang memiliki prestasi akademik tinggi, tetapi kurang kompetitif dalam lingkungan profesional global karena keterbatasan kemampuan berbahasa asing. Sutopo dan Haryanto (2022) menegaskan bahwa rendahnya kemampuan bahasa asing di kalangan lulusan Indonesia menjadi hambatan dalam mobilitas akademik dan profesional di tingkat internasional.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan kebijakan pendidikan yang bersifat integratif, yaitu kebijakan yang menggabungkan aspek linguistik, kurikulum, dan administrasi publik dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Kebijakan integratif tidak hanya berfokus pada pengajaran bahasa asing di kelas, tetapi juga mencakup desain kurikulum, penyediaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta evaluasi capaian belajar yang terukur. Dalam konteks administrasi publik, pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pendidikan, di mana

setiap kebijakan dirancang dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Dunn, 2021).

Dari perspektif linguistik terapan, pengembangan kompetensi bahasa asing perlu dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan kontekstual yang menempatkan mahasiswa sebagai pengguna aktif bahasa dalam berbagai situasi sosial. Richards (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa asing bergantung pada relevansi konteks penggunaan dan keterhubungannya dengan kebutuhan profesional peserta didik. Dalam konteks perguruan tinggi, kebijakan pembelajaran bahasa asing perlu diintegrasikan dengan bidang keilmuan agar bahasa menjadi sarana berpikir ilmiah dan profesional. Misalnya, mahasiswa ekonomi harus memahami terminologi bisnis global, sedangkan mahasiswa hukum perlu menguasai istilah hukum lintas negara.

Namun, pengembangan kompetensi bahasa asing tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan tanpa dukungan kebijakan publik yang kuat. Administrasi publik berperan penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang mendukung penguatan kemampuan bahasa di semua level institusi. Hal ini mencakup penyediaan tenaga pengajar berkualitas, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan global, dan pengalokasian sumber daya yang memadai. Menurut UNESCO (2022), negara-negara yang berhasil meningkatkan daya saing pendidikan tinggi adalah yang menempatkan kebijakan bahasa sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

Kebijakan integratif dalam pengembangan kompetensi bahasa asing juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas dan relevansi lulusan. Lulusan dengan kemampuan bahasa asing yang baik tidak hanya mampu mengakses pengetahuan global, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi lintas budaya yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *employability* lulusan (Hagen, 2020; OECD, 2023). Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) memperlihatkan bahwa perusahaan multinasional memprioritaskan pelamar dengan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang.

Dari sisi kualitas akademik, kebijakan integratif memungkinkan perguruan tinggi memperkuat kurikulum berorientasi internasional. Pendekatan seperti *Content and Language Integrated Learning (CLIL)* telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan wawasan global mahasiswa (Nunan & Choi, 2021). Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan ini dapat diadaptasi sebagai bagian dari reformasi kurikulum nasional yang mendorong kolaborasi antara bidang linguistik, manajemen pendidikan, dan perencanaan kebijakan publik.

Meski demikian, implementasi kebijakan integratif di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Pertama, kesenjangan mutu antarperguruan tinggi

menyebabkan perbedaan signifikan dalam kemampuan bahasa asing lulusan. Kedua, banyak lembaga pendidikan belum memiliki strategi manajemen sumber daya manusia yang mendukung peningkatan kapasitas pengajar bahasa asing. Ketiga, lemahnya sinergi antara perguruan tinggi dan industri menimbulkan ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Laporan *World Economic Forum* (2023) menegaskan bahwa *skills gap* masih menjadi salah satu hambatan utama daya saing tenaga kerja Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Dari perspektif administrasi publik, tantangan ini menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan antara pemerintah, universitas, dan sektor industri. Kebijakan bahasa asing seharusnya menjadi bagian dari strategi nasional pengembangan daya saing global, bukan sekadar urusan fakultas bahasa. Prinsip desentralisasi pendidikan perlu diimbangi dengan standar mutu nasional yang menetapkan capaian kompetensi bahasa asing bagi seluruh lulusan perguruan tinggi.

Selain aspek kebijakan dan manajemen, dimensi sosial budaya juga memainkan peran penting dalam pengembangan kompetensi bahasa asing. Bahasa tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu berkaitan dengan nilai, norma, dan identitas budaya. Oleh karena itu, kebijakan pengajaran bahasa asing harus memperhatikan aspek interkultural agar mahasiswa tidak hanya memahami struktur bahasa, tetapi juga cara berpikir dan berinteraksi lintas budaya. Byram (2021) menegaskan bahwa kompetensi interkultural merupakan inti dari kompetensi komunikatif dalam pendidikan modern.

Dalam konteks ini, kebijakan integratif dapat dipahami sebagai upaya menyatukan bahasa, budaya, dan kebijakan publik dalam satu sistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Perguruan tinggi harus menjadi ruang pembentukan kemampuan komunikasi global yang tidak hanya berbasis linguistik, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah melalui kebijakan publik yang inklusif harus memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh akses setara terhadap pembelajaran bahasa asing yang berkualitas.

Dengan demikian, kebijakan integratif dalam pengembangan kompetensi bahasa asing bukan sekadar kebijakan teknis pendidikan, melainkan strategi nasional yang berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa. Melalui sinergi antara teori linguistik terapan dan prinsip administrasi publik, kebijakan ini dapat mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan cerdas, komunikatif, dan kompetitif di tingkat global. Keberhasilan penerapannya akan menjadi cerminan kemampuan negara dalam merespons tantangan globalisasi dan memperkuat posisi pendidikan tinggi sebagai motor penggerak pembangunan manusia unggul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kebijakan integratif dalam pengembangan kompetensi bahasa asing di Universitas Bina

Taruna (UNBITA) Gorontalo serta implikasinya terhadap kualitas dan relevansi lulusan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam makna, persepsi, dan strategi kebijakan dalam konteks institusional yang spesifik.

Penelitian dilaksanakan di UNBITA Gorontalo, perguruan tinggi swasta yang sedang mengembangkan kebijakan internal dalam penguatan kemampuan bahasa asing mahasiswa. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan dalam kegiatan akademik, serta dampaknya terhadap kesiapan lulusan di dunia kerja. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan fakultas, dosen bahasa asing, dan mahasiswa tingkat akhir, disertai observasi non-partisipatif terhadap proses pembelajaran. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap pedoman kurikulum, laporan akademik, dan dokumen kebijakan nasional untuk melengkapi data primer.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi hasil kepada informan. Seluruh proses penelitian dilaksanakan sesuai prinsip etika akademik dengan menjamin kerahasiaan informan dan menghormati aktivitas akademik yang berlangsung. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan kebijakan integratif dalam pengembangan kompetensi bahasa asing di UNBITA Gorontalo dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas serta relevansi lulusan di tingkat global.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan dinamika penerapan kebijakan integratif dalam pengembangan kompetensi bahasa asing di Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan relevansi lulusan di era global. Kebijakan ini menjadi penting karena pendidikan tinggi tidak lagi hanya dituntut menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga mampu bersaing dalam lingkungan kerja yang multikultural dan berbasis komunikasi lintas bahasa. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dirasakan dampaknya di tingkat institusional maupun individual. Analisis hasil penelitian difokuskan pada hubungan antara kebijakan formal yang diadopsi universitas dan realitas pelaksanaannya dalam praktik akademik sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan berikut tidak hanya menguraikan keberhasilan kebijakan, tetapi juga mengungkap berbagai hambatan struktural, pedagogis, dan kultural yang memengaruhi efektivitas implementasinya di lingkungan UNBITA.

Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perhatian terhadap penguatan kemampuan bahasa asing di kalangan mahasiswa. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap tuntutan globalisasi dan

kebutuhan dunia kerja yang semakin menekankan pentingnya kemampuan komunikasi lintas bahasa. Dalam dokumen rencana strategis universitas, kemampuan bahasa asing disebut sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki lulusan, khususnya bahasa Inggris yang dianggap sebagai alat utama komunikasi internasional. Namun, kebijakan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat biro akademik dan dosen, kebijakan peningkatan kompetensi bahasa asing belum dituangkan secara rinci dalam pedoman pelaksanaan akademik universitas. Meskipun terdapat sejumlah inisiatif seperti pelatihan TOEFL dan kegiatan *English Conversation Club*, kegiatan ini cenderung berjalan sporadis dan belum menjadi bagian dari sistem akademik yang terintegrasi.

Pemikiran Djaba dan Arifin (2024) menekankan bahwa inovasi dalam administrasi publik merupakan kunci untuk menghadapi dinamika era digital yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan. Pandangan ini relevan dengan konteks pengembangan kebijakan integratif dalam bidang pendidikan tinggi, khususnya dalam memperkuat kompetensi bahasa asing. Seperti halnya administrasi publik yang bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan pendidikan juga perlu berinovasi agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan global. Dalam hal ini, universitas dituntut tidak hanya berperan sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai entitas administratif yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan bahasa asing yang dirancang secara integratif dapat menjadi contoh penerapan prinsip inovasi administrasi dalam konteks manajemen pendidikan tinggi, sejalan dengan arah reformasi birokrasi akademik di era digital. Penerapan gagasan inovasi administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Djaba dan Arifin (2024) tercermin dalam langkah-langkah strategis yang mulai dilakukan oleh Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo dalam merancang kebijakan penguatan kompetensi bahasa asing. Universitas ini berupaya mengintegrasikan prinsip inovasi administrasi ke dalam tata kelola pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan global, serta peningkatan kolaborasi lintas disiplin. Misalnya, penggunaan platform daring untuk pelatihan bahasa asing dan kolaborasi akademik dengan mitra luar negeri menunjukkan bahwa UNBITA tidak hanya berfokus pada aspek pedagogis, tetapi juga pada efisiensi dan adaptabilitas sistem administrasinya. Namun, seperti yang juga diingatkan, inovasi administrasi memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan komitmen kelembagaan agar tidak berhenti pada tataran kebijakan normatif. Dalam konteks ini, tantangan UNBITA adalah memastikan bahwa transformasi digital dan kebijakan integratif yang dijalankan mampu diimplementasikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing lulusan di pasar kerja global.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat kebijakan (policy intent)

dan pelaksanaan kebijakan (policy implementation). UNBITA telah memiliki kesadaran akan pentingnya bahasa asing, namun belum diikuti dengan dukungan kelembagaan yang kuat. Selain itu, masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengajaran bahasa menjadi hambatan utama dalam memperluas jangkauan kebijakan. Beberapa mahasiswa yang diwawancarai juga mengaku bahwa pembelajaran bahasa asing di kampus masih bersifat formalistik dan kurang aplikatif. Mereka memahami bahasa sebagai mata kuliah wajib, bukan sebagai keterampilan profesional yang dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi kebijakan belum sepenuhnya membentuk budaya akademik yang mendukung penguasaan bahasa asing secara berkelanjutan.

1. Implementasi Kebijakan dalam Kurikulum dan Aktivitas Akademik

Dalam tataran kurikulum, kebijakan penguatan bahasa asing di UNBITA diterapkan melalui mata kuliah wajib bahasa Inggris yang umumnya diberikan pada semester awal. Berdasarkan telaah dokumen kurikulum, setiap program studi memiliki minimal satu hingga dua mata kuliah bahasa Inggris, tetapi dengan bobot dan fokus yang bervariasi. Program studi yang berorientasi pada administrasi publik atau manajemen cenderung menempatkan bahasa asing dalam konteks akademik umum, bukan dalam konteks profesi atau keahlian bidang tertentu.

Implementasi kebijakan ini juga masih menghadapi kendala ketidakkonsistenan antarprogram studi. Beberapa fakultas menunjukkan kemajuan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran komunikatif dan berbasis proyek, sementara fakultas lainnya masih menggunakan metode tradisional yang berfokus pada tata bahasa. Ketimpangan ini menunjukkan belum adanya koordinasi lintas fakultas untuk memastikan keseragaman standar kemampuan bahasa asing bagi seluruh mahasiswa.

Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa meskipun terdapat inisiatif pembelajaran berbasis praktik, sarana dan prasarana yang mendukung masih terbatas. Sebagian besar kegiatan pembelajaran masih dilakukan di ruang kelas konvensional tanpa dukungan teknologi modern. Dalam hal ini, kebijakan integratif masih berada pada tahap wacana, belum sampai pada sistem implementasi yang terukur dan berkelanjutan.

Kegiatan nonformal seperti klub bahasa dan pelatihan TOEFL memang menjadi langkah positif, tetapi partisipasi mahasiswa relatif rendah. Berdasarkan wawancara, banyak mahasiswa menganggap kegiatan tersebut hanya relevan bagi mereka yang berminat melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri. Rendahnya motivasi ini mencerminkan bahwa kebijakan universitas belum sepenuhnya berhasil menginternalisasikan pentingnya bahasa asing dalam seluruh disiplin akademik. Selain itu, belum adanya kebijakan insentif membuat dosen maupun mahasiswa tidak memiliki dorongan yang kuat untuk berpartisipasi aktif. Beberapa dosen menyampaikan bahwa pelatihan bahasa asing jarang mendapat dukungan anggaran, dan kegiatan semacam itu

lebih sering diinisiasi secara pribadi daripada didukung institusi. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen struktural universitas dalam menerapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas global.

2. Tantangan Struktural dan Kultural dalam Pelaksanaan Kebijakan

Secara struktural, hambatan utama yang dihadapi UNBITA adalah keterbatasan sumber daya dan prioritas kebijakan yang masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan administratif dan akreditasi. Program penguatan bahasa asing belum menjadi bagian dari rencana strategis yang memiliki alokasi anggaran jelas. Situasi ini membuat kebijakan bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif individu, bukan pada sistem kebijakan yang mapan.

Dari segi sumber daya manusia, sebagian besar dosen bahasa asing di UNBITA masih terbatas dalam jumlah dan belum semuanya memiliki pengalaman internasional atau sertifikasi pengajaran bahasa. Hal ini berpengaruh pada variasi metode pembelajaran dan kualitas output mahasiswa. Sebagaimana diungkapkan Nunan (2015), keberhasilan pembelajaran bahasa sangat bergantung pada kualitas tenaga pengajar serta lingkungan belajar yang kondusif.

Dari sisi budaya akademik, tantangan yang lebih mendasar adalah rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya kemampuan bahasa asing. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa menilai bahasa asing tidak terlalu relevan dengan jurusan mereka. Di sisi lain, dosen dari program studi non-bahasa mengaku tidak memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan unsur bahasa asing dalam mata kuliah yang mereka ajarkan. Akibatnya, kebijakan ini cenderung menjadi domain eksklusif mata kuliah bahasa, bukan bagian dari keseluruhan pengalaman akademik mahasiswa.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan integratif masih berada pada tahap awal transisi, di mana universitas berupaya menghubungkan kebijakan bahasa asing dengan sistem akademik, namun masih menghadapi resistensi budaya dan kendala struktural. Perubahan semacam ini membutuhkan waktu dan konsistensi, karena menyangkut transformasi nilai dalam komunitas akademik, bukan hanya perubahan administratif.

3. Dampak terhadap Kualitas dan Relevansi Lulusan

Meskipun kebijakan penguatan bahasa asing di UNBITA belum sepenuhnya terlembaga, dampak positif mulai terlihat pada sebagian kecil mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan kebahasaan. Mahasiswa yang mengikuti pelatihan TOEFL atau aktif dalam klub bahasa menunjukkan peningkatan keterampilan komunikasi, terutama dalam aspek kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan publik. Namun, secara umum, hasilnya masih belum merata di seluruh program studi. Implementasi kebijakan yang tidak konsisten juga berdampak pada persepsi publik terhadap kualitas lulusan. Lembaga pengguna lulusan cenderung menilai kemampuan bahasa mahasiswa UNBITA masih di

bawah standar nasional. Kelemahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembelajaran, tetapi juga dengan rendahnya eksposur mahasiswa terhadap lingkungan akademik yang mendukung penggunaan bahasa asing secara aktif.

Meski begitu, kebijakan ini tetap memberi peluang untuk perbaikan. Dengan memperkuat sistem pelatihan yang terstruktur dan memasukkan bahasa asing sebagai komponen evaluasi lulusan, UNBITA berpotensi meningkatkan daya saing mahasiswanya di masa depan. Namun, jika kebijakan tetap berjalan tanpa dukungan kebijakan kelembagaan yang kuat dan evaluasi berkala, maka efeknya hanya bersifat simbolis tanpa menghasilkan perubahan substantif terhadap kualitas lulusan.

4. Analisis Kebijakan: Arah dan Implikasi Jangka Panjang

Kebijakan integratif di UNBITA dapat dikategorikan sebagai kebijakan adaptif parsial, yaitu kebijakan yang muncul sebagai respon terhadap dinamika eksternal, tetapi belum memiliki landasan internal yang kokoh. Berdasarkan kerangka analisis, efektivitas kebijakan publik bergantung pada konsistensi antara tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks UNBITA, tujuan peningkatan kompetensi bahasa asing sudah jelas, namun pelaksanaan masih terbatas dan belum didukung oleh sistem evaluasi yang terukur.

Ketiadaan indikator kinerja kebahasaan menjadi salah satu kelemahan mendasar. Hingga kini, belum ada sistem penilaian universitas yang secara eksplisit mengukur kemampuan bahasa asing mahasiswa secara komprehensif. Akibatnya, sulit menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas lulusan. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarunit akademik juga masih lemah. Implementasi kebijakan sering kali bergantung pada inisiatif dosen atau program studi tertentu tanpa panduan universitas yang seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan integratif di UNBITA lebih bersifat fragmentaris daripada sistemik. Untuk mencapai hasil yang signifikan, universitas perlu mengembangkan model kebijakan yang menghubungkan pengajaran bahasa asing dengan kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara simultan.

Jika dikelola dengan lebih strategis, kebijakan ini memiliki potensi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing universitas dan memperluas jejaring akademik internasional. Namun, tanpa reformasi manajerial dan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut berisiko berhenti pada tataran formalitas administratif—sekadar memenuhi tuntutan akreditasi atau citra institusional tanpa perubahan nyata dalam kualitas lulusan.

5. Sintesis: Menuju Kebijakan Bahasa Asing yang Realistis dan Kontekstual

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya UNBITA Gorontalo dalam mengembangkan kebijakan penguatan bahasa asing masih berada pada tahap awal yang penuh tantangan. Meskipun terdapat langkah-langkah positif seperti penyediaan

mata kuliah bahasa Inggris dan pelatihan nonformal, kebijakan tersebut belum menunjukkan integrasi yang kuat antara aspek kelembagaan, pedagogis, dan kultural.

Keberhasilan kebijakan integratif memerlukan komitmen jangka panjang dan keberpihakan pada investasi sumber daya manusia. Kebijakan tidak cukup diukur dari keberadaan mata kuliah bahasa asing, tetapi dari sejauh mana universitas mampu menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan bahasa asing dalam kegiatan akademik sehari-hari. Tanpa itu, kebijakan hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan transformasi nyata dalam kualitas lulusan.

Dengan demikian, UNBITA perlu meninjau ulang strategi kebijakan bahasa asingnya agar lebih realistis dan kontekstual. Fokus sebaiknya diarahkan pada penguatan kapasitas dosen, penyediaan sarana pembelajaran modern, dan penanaman kesadaran mahasiswa tentang relevansi bahasa asing dalam karier profesional. Langkah-langkah tersebut lebih menjanjikan hasil jangka panjang daripada kebijakan seremonial yang hanya menambah beban administratif.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan integratif dalam pengembangan kompetensi bahasa asing di Universitas Bina Taruna Gorontalo merupakan langkah strategis yang lahir dari kesadaran institusi terhadap tuntutan globalisasi dan kebutuhan peningkatan kualitas lulusan. Meskipun arah kebijakan telah menunjukkan perhatian terhadap pentingnya penguasaan bahasa asing, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan manajerial. Kebijakan ini baru sampai pada tahap konseptual dan belum sepenuhnya menjelma menjadi sistem yang terintegrasi dalam kurikulum dan budaya akademik. Pelaksanaan di tingkat fakultas cenderung tidak seragam, tergantung pada inisiatif masing-masing dosen atau unit, sementara dukungan kelembagaan dan sumber daya pembelajaran masih terbatas.

Dari sisi mahasiswa, kemampuan bahasa asing umumnya masih berada pada level dasar, dengan kesenjangan yang cukup besar antara harapan universitas dan realitas di lapangan. Mahasiswa memahami pentingnya bahasa asing, tetapi belum semuanya melihatnya sebagai kebutuhan profesional yang mendesak. Faktor lingkungan belajar, keterbatasan sarana, dan kurangnya praktik berbasis komunikasi turut memperlambat peningkatan kompetensi tersebut. Di sisi lain, dosen menghadapi keterbatasan waktu dan pelatihan dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kontekstual. Akibatnya, kebijakan ini berjalan dalam ruang administratif yang baik di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan perubahan nyata terhadap kualitas dan relevansi lulusan.

Namun demikian, kebijakan integratif ini tetap memiliki nilai penting sebagai fondasi bagi transformasi akademik jangka panjang di UNBITA. Upaya penguatan kompetensi bahasa asing dapat menjadi pintu masuk menuju internasionalisasi

pendidikan tinggi di daerah. Untuk mewujudkannya, universitas perlu memperkuat komitmen kelembagaan dengan menjadikan penguasaan bahasa asing sebagai indikator strategis dalam rencana pengembangan mutu. Penguatan kapasitas dosen, pembaruan kurikulum berbasis praktik komunikasi global, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran digital dapat menjadi langkah konkret menuju sistem pembelajaran yang lebih adaptif.

Selain itu, penting bagi universitas untuk menumbuhkan budaya akademik yang mendukung penggunaan bahasa asing dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam diskusi kelas, publikasi ilmiah, maupun forum akademik kampus. Dengan cara ini, kemampuan bahasa asing tidak lagi berdiri sebagai keterampilan tambahan, tetapi menjadi bagian integral dari identitas akademik mahasiswa dan dosen. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang sudah diterapkan juga perlu dilakukan agar universitas dapat mengukur sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas lulusan.

Jika dilakukan secara konsisten dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, kebijakan penguatan bahasa asing di UNBITA Gorontalo berpotensi menjadi model pengembangan kapasitas akademik di perguruan tinggi daerah. Namun, tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, kebijakan ini berisiko berhenti pada tataran simbolik semata. Oleh karena itu, langkah yang paling mendesak adalah memperkuat dimensi implementatif dan membangun sistem pembelajaran yang realistis, kontekstual, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan demikian, kebijakan integratif ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan tinggi dan pemberdayaan sumber daya manusia yang berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2022). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives* (Updated ed.). New York, NY: Longman.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Djaba, M., & Arifin, R. (2024). Inovasi Dalam Administrasi: Menyongsong Tantangan Era Digital. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, 1(1), 20–28. Retrieved from <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/p-jiams/article/view/217>
- Dunn, W. N. (2021). *Public policy analysis: An integrated approach* (7th ed.). New York, NY: Routledge.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nunan, D., & Choi, J. (2021). *Innovation in language learning and teaching: The case of Asia*. New York, NY: Routledge.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from <https://www.oecd.org/education>
- Richards, J. C. (2022). *Curriculum development in language teaching* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Tollefson, J. W., & Pérez-Milans, M. (Eds.). (2021). *The Oxford handbook of language policy and planning*. Oxford: Oxford University Press.
- UNESCO. (2022). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org>
- World Bank. (2023). *Improving higher education outcomes in Indonesia: Policy recommendations for relevance and quality*. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from <https://documents.worldbank.org>
- World Economic Forum. (2023). *The future of jobs report 2023*. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports>
- Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.